



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Tanjung Dewa, tanggal XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. XX XX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 16 Januari 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panipatan, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, berumur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Pemohon merasa Termohon terlalu boros dan tidak bisa mengatur perekonomian rumah tangga dengan baik;
- b. Setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur;

5.-----

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Pemohon memutuskan untuk kembali ke Merauke dengan tujuan bekerja, akan tetapi pada bulan September 2019 Pemohon mengetahui dari keluarga yang ada disana bahwa Termohon telah menikah dan memiliki anak dari pria lain tanpa diketahui oleh Pemohon;

6.-----

Bahwa setelah Pemohon mengetahui hal tersebut, Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa selama empat bulan berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan pertama dan kedua Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 24 Februari 2020 Termohon telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Pelaihari secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada saat sidang yang ditetapkan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



mengantur keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon ikut campur di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pergi ke Merauke;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017, yang awalnya Pemohon kembali ke Merauke untuk bekerja namun ternyata pada bulan September 2019 Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain,;
- bahwa sejak September 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon maupun Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dan keduanya bertekad untuk bercerai;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon merasa Termohon terlalu boros dan tidak bisa



mengatur perekonomian rumah tangganya, setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur;

- bahwa saksi tahu bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon sering cerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- bahwa pada bulan Maret 2017, Pemohon kembali ke Merauke untuk bekerja namun ternyata pada bulan September 2019 Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Termohon diketahui telah menikah pada bulan September 2019 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa selama pisah setahu saksi Pemohon sudah tidak ada hubungan lagi dengan Termohon dan tidak pernah lagi saling menemui;
- bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diunag dan

Halaman 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b), selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon secara sepihak dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 350 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon merasa Termohon terlalu boros dan tidak bisa mengatur perekonomian rumah tangga dengan baik dan setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur dan pada tanggal 16 Maret 2017 Pemohon memutuskan untuk kembali ke Merauke dengan tujuan bekerja, akan tetapi pada bulan September 2019

Halaman 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui dari keluarga Pemohon bahwa Termohon telah menikah dan memiliki anak dari pria lain tanpa diketahui oleh Pemohon sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Pemohon hal ini telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panipatan, Kabupaten Tanah Laut yang menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember 2014 dimana bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat

Halaman 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 1735 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya telah mengetahui setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; sebagaimana maksud dalil Pemohon pada posita angka 2, dan 3

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon pada posita angka 4, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sejak awal menikah sering terjadi pertengkaran dan mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua yaitu Termohon Pemohon merasa Termohon terlalu boros dan tidak bisa mengatur perekonomian rumah tangganya, setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur, saksi pertama mengetahui penyebab dan pertengkaran tersebut secara langsung karena tinggal di XXXXXXXXXX dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon yang keterangannya bersifat de auditu dan dari pengetahuan langsung saksi pertama dan kedua yang mengetahui sejak September 2019 tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah menikah

Halaman 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain sebagaimana maksud dalil posita angka 5 dan 6 dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menemui, dan saksi pertama pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun keduanya berkehendak untuk bercerai dan juga saksi kedua sudah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bertekad untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua, serta informasi ataupun cerita yang diketahui juga oleh saksi saksi kedua dapat dijadikan sebagai persangkaan Hakim sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung dan saling bersesuaian yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, apabila bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur dan pada bulan September 2019 diketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tanpa ada hubungan dan komunikasi lagi, sebagaimana maksud dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dalam mengatur perekonomian rumah tangganya, setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur;

Halaman 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019, karena telah diketahui Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sehingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan akan tetapi didalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan tidak ada kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon boros dalam mengatur perekonomian rumah tangganya, setiap kali terjadi pertengkaran orang tua Termohon selalu ikut campur bahkan Termohon diketahui menjalin hubungan/menikah dengan laki-laki lain hal ini menimbulkan ketidakrelaan Pemohon karena sikap dan perbuatan Termohon sebagai istri dalam hal menjaga sikap dan perbuatan Termohon sebagai istri yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, hal mana didalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mendukung dan memberikan bimbingan antara suami istri, justru sebaliknya di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon sehingga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu maupun tinggal bersama, hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Halaman 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun saksi-saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon dan juga disetiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil sehingga Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : "dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk

Halaman 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak disamping itu juga telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat

Halaman 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Merauke sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 350 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

t t d

Saiful Mujib, S.H.

Hakim,

t t d

Achmad, N.S.HI.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 790.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 906.000,00

(sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)